

OMBUDSMAN KOORDINASIKAN NETRALITAS ASN DALAM PEMILUKADA BERSAMA BAWASLU

Jum'at, 18 Oktober 2024 - kepbabel

Siaran Pers

049/HM.01/X/2024

Kamis, 17 Oktober 2024

Pangkalpinang - Ombudsman Babel melakukan kunjungan ke Bawaslu Babel dalam rangka koordinasi pengawasan netralitas ASN dalam pilukada 2024. Dalam agenda kunjungan dan koordinasi ini, Ombudsman Babel diterima langsung oleh Anggota Bawaslu Babel, Sahirin bersama Kabag Pengawasan. Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy menyampaikan peran pengawasan Ombudsman terhadap ASN merupakan bagian dari tanggung jawab profesi mereka yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, Rabu (16/10/2024).

Ombudsman Babel menyampaikan mengawasi netralitas ASN di masa pilukada merupakan kewajiban yang dilakukan untuk menjaga integritas dalam pelayanan publik. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Ombudsman Babel menekankan pentingnya pengawasan internal pemerintah dalam mengawasi kinerja ASN selama Pilukada.

"Ombudsman memiliki dua instrumen dalam melakukan pengawasan netralitas ASN pada masa pilukada. Pertama, instrumen laporan masyarakat yang melaporkan aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik ASN yang tidak ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang. Kedua, Ombudsman dapat memantau tindak lanjut rekomendasi yang telah diterbitkan suatu instansi akan tetapi tidak mendapatkan tindak lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan," ungkap Yozar.

Yozar menambahkan sejauh ini belum ada laporan yang masuk terkait dengan netralitas ASN ke Ombudsman Babel selama pilukada berlangsung. Tentu dalam hal ini, baik Ombudsman dan Bawaslu memiliki kewenangan pada ruang lingkup tersebut.

"Ombudsman lebih menekankan pada aspek pelayanan publik terutama potensi maladministrasi yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik. Disamping itu, Ombudsman membuka ruang kepada masyarakat yang ingin berkonsultasi terhadap permasalahan netralitas ASN," ujar Yozar.

Ombudsman Babel berharap pelaksanaan pilukada dapat berjalan adil dan lancar. Penting bagi pejabat atau pelaksana pelayanan publik untuk memiliki nilai-nilai integritas, jangan sampai suatu perbuatan tidak netral dari pejabat atau pelaksana pelayanan publik akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Bawaslu Babel menyambut baik kunjungan Ombudsman Babel untuk meningkatkan koordinasi dalam penguatan pengawasan terutama terhadap kode etik atau pelanggaran ASN dalam penyelenggaraan pilukada.

"Bawaslu membutuhkan peran Ombudsman Babel yang juga memiliki kewenangan terhadap netralitas ASN pada masa pilukada. Kecenderungan pelanggaran kode etik ASN terjadi pada media sosial baik pra dan paska pilukada berlangsung," ujar Sahirin.

Narahubung:

Agung Nugraha, (085367194837)

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Babel

Humas Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

Kantor Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung

Jln. Ahmad Yani No.3 Pangkalpinang-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

www.ombudsman.go.id